

RINGKASAN

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM Kabupaten Banyuwangi sebelumnya merupakan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran membawa semangat konsep penyiaran dalam nuansa demokrasi yang intinya adalah pemerintah dilarang menguasai lembaga penyiaran. Sehingga diperkenalkan konsep baru yang disebut Lembaga Penyiaran Publik, perbedaannya terletak pada orientasi kepentingan yang sebelumnya mementingkan citra pemerintah, sekarang LPPL sebagai lembaga penyiaran yang independen dan netral berorientasi pada kepentingan publik.

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney dalam Nurudin (2017: 64) antara lain: (1) *to inform* (menginformasikan), (2) *to entertain* (memberi hiburan), (3) *to persuade* (membujuk), (4) *transmission of the culture* (transmisi budaya). Di sisi lain, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melindungi hak publik untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu, peneliti fokus meneliti fungsi informasi LPPL Radio Suara Blambangan FM Kabupaten Banyuwangi dalam keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LPPL Radio Suara Blambangan FM Kabupaten Banyuwangi sebagai media keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin melakukan analisis yang mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan penelitian. Informan ditentukan berdasarkan keterlibatan dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditambah informan yang tidak terlibat namun mengetahui informasi. Penggalan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, serta triangulasi. Peneliti menggunakan teori ekonomi politik media dalam melakukan analisis informasi sampai dengan pelaporan hasil penelitian.

Pembahasan penelitian menemukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM belum menjalankan perannya sebagai media keterbukaan informasi publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM dihadapkan pada permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan program siaran dalam melaksanakan perannya sebagai media keterbukaan informasi publik. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk Dewan Pengawas secara definitif. Bila independensi kelembagaan tidak terwujud maka akan mengancam ruang publik karena lembaga penyiaran publik lokal sebagai ruang publik harus terbebas dari intervensi pemerintah, sehingga masalah publik dapat didiskusikan secara rasional.

Penelitian memberikan saran kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM untuk lebih meningkatkan perannya sebagai media keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM diharapkan akan menjadi saluran komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi disarankan menjadi mitra LPPL Radio Suara Blambangan FM dalam menjalankan perannya sebagai media keterbukaan informasi publik daripada menjadi penguasa LPPL. Selain itu juga disarankan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk menjadikan pembentukan Dewan Pengawas sebagai program skala prioritas.

Kata Kunci: lembaga penyiaran publik lokal, keterbukaan informasi publik

ABSTRAK

Penelitian ini fokus membahas tentang peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya merupakan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran membawa semangat konsep penyiaran dalam demokrasi bahwa pemerintah dilarang menguasai lembaga penyiaran. Sehingga diperkenalkan konsep baru yang disebut Lembaga Penyiaran Publik yang independen dan netral berorientasi pada kepentingan publik. Di sisi lain, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melindungi hak publik untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti peran LPPL Radio Suara Blambangan FM sebagai media keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin melakukan analisis yang mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat menghasilkan pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan penelitian. Penggalan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, serta triangulasi. Peneliti menggunakan teori ekonomi politik media dalam melakukan analisis sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM belum menjalankan perannya sebagai media keterbukaan informasi publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Blambangan FM dihadapkan pada permasalahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan program siaran dalam melaksanakan perannya sebagai media keterbukaan informasi publik. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk Dewan Pengawas secara definitif. Bila independensi kelembagaan tidak terwujud maka akan mengancam ruang publik karena lembaga penyiaran publik lokal sebagai ruang publik harus terbebas dari intervensi pemerintah, sehingga masalah publik dapat didiskusikan secara rasional.

Kata Kunci: lembaga penyiaran publik lokal, keterbukaan informasi publik

ABSTRACT

The focus of this research is to discuss about the role of the Local Public Broadcasting Agency of Radio Suara Blambangan FM in Banyuwangi Regency which was formerly Local Government Special Radio. Law number 32 of 2002 concerning Broadcasting brought the spirit of the concept of broadcasting in the democracy that the government is prohibited to dominate the broadcasting Agency. Therefore, a new concept called the independent public broadcasting agency and neutral oriented on public interests is introduced. On the other hand, Law number 14 of 2008 concerning the public information openness protect the rights of the public to obtain information. Therefore, researchers are interested to examine the role of the Local Public Broadcasting Agency of Radio Suara Blambangan FM as a medium for public information openness. This research uses a constructivist paradigm with a qualitative approach, because researchers want to perform an in-depth analysis of the research subject that can produce a deep understanding of the problems of research. Data mining is done using the observation, in-depth interviews and document studies, and triangulation. Researcher uses the media political economy theory in the analysis of information to report research results. Local Public Broadcasting Agency of Radio Suara Blambangan FM has not played its role as a public information openness media. Local Public Broadcasting Agency of Radio Suara Blambangan FM still have institutional problem, human resources, and broadcasting program in carrying out its role as a public information openness media. The way to overcome these problems is to establish a Board of Trustees definitively. If the independency of the institution is not realized it will threaten the public sphere because local public broadcasting institutions as public sphere should be free from government intervention, so that the public issue could be discussed rationally.

Keywords: local public broadcasting agency, public information openness